

# KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Syakina Bur, Muh. Akbar, Lista Patiung, Andi Rifqi Fauzan, Mubarak Fattah, dan Muhammad

Fajrin

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email: syakinabur11@gmail.com

## Abstrak

Menjadi negara kepulauan atau maritim tentu membuat Indonesia memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Banyak potensi yang dimiliki dari laut, di antaranya: penangkapan ikan, tambak ikan, mangrove, dan pemanfaatan tanaman laut, serta masih banyak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi yang dimiliki oleh Wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya perikanan laut di Kota Parepare tangkap, dan untuk mengetahui strategi pengembangan sumber daya manusia khususnya perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir yang menjadi mata pencaharian nelayan. Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah metode sekunder dimana sumber data diperoleh melalui jurnal, adapun metode primer yang digunakan yaitu media diskusi dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Parepare memiliki potensi sebagai kota pantai dengan etak yang strategis, aksesibilitas yang lancar dan potensi keberadaan LAPAN dan industri yang bergerak di sektor perikanan. Adapun hambatan yang hadapi nelayan tangkap yakni pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan masih bersifat tradisional, keterbatasan alat tangkap yang dimiliki nelayan, kemungkinan terjadinya bencana alam dan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan BBM. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan perikanan laut khususnya perikanan tangkap, guna peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan tangkap antara lain; strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan infrastruktur dan strategi kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci:** *potensi, tangkap, pesisir, pengembangan, SENSISTEK*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut 3,1 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 1,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara atau 62% luas teritorialnya [1]. Dengan persentase luas perairan yang besar tersebut, member konsekuensi pada luasnya wilayah pesisir dan lautan. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat- sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Kawasan pesisir Kota Parepare merupakan salah satu wilayah kota yang terus berkembang. Hal tersebut didukung oleh letak pada jalur utama lalu lintas darat Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan lalu lintas laut regional, nasional ditambah ke Tawao Malaysia yakni Pelabuhan Nusantara serta Pelabuhan Cappa Ujung dengan Pelabuhan perahu tradisional dekat kompleks gerbang niaga dan Pasar Lakessi Soreang. Keberadaan jalur lalu lintas darat dan laut ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk khususnya yang berada di kawasan pesisir [2]. Daerah datar di pesisir cukup tinggi tidak cukup lebar sehingga kepadatan bangunan di pesisir yang merupakan kota lama sangat tinggi. Penduduk termasuk migran yang datang dari daerah lain yang bekerja di kota lama sebagian besar bertempat tinggal di sekitar daerah perdagangan yang terdapat di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di wilayah pesisir. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut akan memberikan pengaruh terhadap kebutuhan hidup mereka. Untuk mengatasi permintaan kebutuhan yang terus meningkat, perlu diikuti dengan kenaikan jumlah produksi, dan untuk itu diperlukan teknologi industri yang memadai, baik kualitas dan kuantitas, serta tenaga atau sumber daya manusia yang berkualitas (tingkat pendidikan) [3].

Kota Parepare sebagai kota pantai dengan pusat kota yang berada di pesisir pantai terus mengalami

perkembangan. Pesisir sebagai pusat kota tempat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan kepadatan terjadi baik berupa keragaman aktifitas maupun jumlah penduduk, sehingga kemiskinan khusus masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh nelayan tangkap, dan dalam kerangka pikir ini diidentifikasi faktor internal antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, alat tangkap, alat transportasi dan TPI/PPI dan faktor eksternal antara lain industri perikanan, sumber permodalan dan program/kebijakan pemerintah daerah [4]. Adapun hambatan adalah sesuatu kendala yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut baik berupa hambatan dalam memperoleh sarana alat tangkap dan perahu/kapal, maupun industri yang bergerak di sektor perikanan dengan modal usaha yang dibutuhkan sebagai fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Parepare memiliki kawasan pesisir dan dapat dikategorikan sebagai kota pantai dengan potensi perikanan laut yang dimiliki dan dapat digali dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen masyarakat yang berada di Pesisir Pantai Kota Parepare, dalam hal ini masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Berdasarkan data dan informasi Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2005, masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap berjumlah 325 Rumah Tangga Perikanan Tangkap [5].

Arikunto mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subyek penelitian kurang 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10–15% [6]. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap, dengan demikian diperoleh jumlah sampel sebanyak 50 Rumah Tangga Perikanan Tangkap yakni 15% dari populasi (325 RTP Tangkap). Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan dalam proses analisis maka teknik penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah teknik Simple Random Sampling, yaitu penarikan sampel secara acak dari populasi, dimana keseluruhan populasi memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel dengan kondisi sosial ekonomi cenderung sama.

Selanjutnya jenis dan sumber data, dalam hal ini metode sekunder dimana sumber data diperoleh melalui jurnal, adapun metode primer yang digunakan yaitu media diskusi dan pengamatan. Untuk memperoleh data diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: Pertama observasi, melalui pengamatan langsung di lapangan mengenai permasalahan yang dihadapi secara nyata, kedua kuisioner, melalui penyebaran daftar isian pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini, ketiga Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen resmi dari berbagai sumber yang terkait baik dari lokasi penelitian dan pemerintah berupa kajian literature, keputusan- keputusan serta sejumlah peraturan dan dokumen lainnya, keempat wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan.

Langkah dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor- faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare. Kemudian dianalisis faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan/kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang/ancaman, sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian ini maka analisis kekuatan/kelemahan dan analisis peluang/ancaman.

## **PEMBAHASAN**

Letak Kota Parepare yang strategis berada di pesisir Teluk Makassar, didukung dengan aksesibilitas yang lancar baik jalur darat maupun laut sehinggalah dapat menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan Pulau Kalimantan serta antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi lain yang dimiliki kaitannya dengan peningkatan produksi perikanan tangkap yakni adanya Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai instalasi penginderaan jarak jauh sumber daya alam dapat mendeteksi keberadaan ikan [7].

Untuk mendukung terlaksananya visi Kota Parepare yakni “Mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera berkelanjutan di Kota Parepare yang berpantai dan berbukit indah serta berfungsi kuat sebagai pusat niaga, jasa

dan pendidikan” dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki baik potensi SDA, SDM dan SDB yang ada. Kota Parepare sebagai kota pantai dengan pusat kota yang berada pesisir Teluk Makassar serta dapat menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan pulau Kalimantan serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan didukung dengan aksesibilitas yang lancar baik darat maupun laut [8]. Kondisi tersebut mendorong penduduk untuk melakukan sebagian besar beraktivitas di lokasi tersebut sehingga terjadi kepadatan dan pertambahan penduduk di pesisir. Dengan demikian kompleksitas kegiatan bersifat heterogen, salah satu kegiatan penduduk atau masyarakat yang bermukim di pesisir sebagai nelayan tangkap.

Untuk menentukan strategi pengembangan perikanan laut dalam hal ini perikanan tangkap dilakukan analisis terhadap potensi wilayah Kota Parepare dan SDM Nelayan tangkap dilakukan dengan berbagai langkah, salah satunya yaitu menentukan faktor eksternal dan faktor internal [8], dimana faktor eksternal terbagi menjadi dua yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dalam faktor eksternal maksudnya adalah kondisi Kota Parepare sebagai kota pantai dengan letak yang strategis, aksesibilitas pesisir pantai yang lancar dengan daerah lain, adanya masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap, adanya hasil produksi perikanan tangkap, potensi keberadaan LAPAN dengan penginderaan jarak jauh (citra satelit), adanya PPI/TPI, usia nelayan tangkap tergolong dalam kelompok usia produktif. Adapun kelemahan yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan nelayan tangkap masih rendah, tenaga profesional/penyuluh di bidang perikanan masih kurang, adanya pendangkalan air di lokasi TPI, penataan sarana TPI/PPI belum optimal atau sarana belum menyatu dalam satu lokasi TPI/PPI, kelembagaan pemerintah di sektor perikanan belum optimal, tingkat pendapatan nelayan tangkap masih rendah, keterbatasan alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan nelayan tangkap, masih adanya nelayan tangkap yang tidak termasuk dalam kelompok nelayan sehingga kesulitan dalam memperoleh modal usaha, biaya pendidikan bagi nelayan tangkap masih sangat mahal.

Adapun faktor eksternal terbagi juga menjadi dua yaitu peluang dan ancaman. Dimana peluang dalam hal ini adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare, adanya instansi pemerintah yang menangani bidang perikanan dan perindustrian, adanya industri yang bergerak di sektor perikanan, kewenangan Daerah untuk mengembangkan potensi yang ada/Otonomi Daerah, sumber modal usaha yang difasilitasi atas kerjasama pemerintah dan swasta/pengusaha, kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan perikanan laut dalam hal ini perikanan tangkap. Selanjutnya yaitu ancaman dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu diantaranya pergantian pimpinan dalam roda pemerintahan, terjadinya degradasi lingkungan, adanya pengusaha/tengkulak yang menguasai nelayan tangkap, kenaikan harga dan kelangkaan BBM, adanya TPI/PPI di daerah lain.

Berdasarkan dengan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tangkap berada di bawah standar atau belum mencapai standar Upah Minimum Regional sehingga masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jarak jangkauan perahu/kapal yang digunakan masih tradisional yakni perahu mesin tempel (katinting) dan alat tangkap yang digunakan nelayan hanya 1 jenis. Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan difasilitasi oleh beberapa instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang menangani bidang perikanan yakni Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (Dinas PKPK) sedangkan bidang industri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah (Dinas Perindag dan PMD). Pasca produksi perikanan tangkap yang ditekuni oleh nelayan diolah menjadi abon ikan, ikan asin dan ikan kering yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang berdiam di pesisir pantai. Kegiatan industri rumah tangga tersebut dikerjakan oleh anggota keluarga nelayan tangkap sebagai tambahan pendapatan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindag dan PMD terdapat 32 industri dengan 6 jenis usaha yang tekuni [7]. Dalam pengembangan usaha tersebut, baik industri maupun penangkapan ikan nelayan tangkap terkendala pada modal usaha yang sulit diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan tangkap bahwa untuk memperoleh modal usaha, mereka difasilitasi oleh pengusaha yang bersedia memberikan fasilitas dengan ketentuan nelayan tangkap akan menjual hasil tangkapan kepada pengusaha tersebut sampai batas waktu pendaratan ikan dari laut dan harga ditetapkan oleh pengusaha tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi wilayah pesisir Kota Parepare antara lain letak yang strategis dengan aksesibilitas pesisir pantai yang lancar dengan daerah lain, kondisi Kota Parepare sebagai kotapantai, potensi keberadaan LAPAN yang memberikan kontribusi terhadap aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan dan adanya PPI/TPI. Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut yakni SDM nelayan tangkap yang masih rendah, keterbatasan sarana yang dipergunakan nelayan tangkap, kemungkinan terjadinya bencana alam, adanya pengusaha yang dari luar daerah dan kenaikan harga serta kelangkaan BBM. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi perikanan laut guna mensejahterakan kehidupan nelayan tangkap, khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia, antara

lain: mengadakan pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi nelayan tangkap, penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan, rekrutmen bagi tenaga penyuluh di bidang perikanan, mendorong peningkatan produksi dan pengembangan industri pasca produksi perikanan, pembentukan kredit usaha/koperasi nelayan atau dengan bantuan/subsidi sebagai modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arman, Andi Baso. Edisi IX Bulan September Tahun 2006. Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir Laut. Bandar Madani (Buletin Internal Pemnda Kota Parepare, 10.
- [2] Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., Sitepu, M.J. 1996. Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir.
- [3] Isma, Muslimah. 2002. Faktor Penghambat Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai. Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- [4] Satria, A. 2002. Pengantar Sosial Masyarakat Pesisir. PT. Pustaka Cidesindo: Jakarta.
- [5] Sub Dinas Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-pulau kecil. 2003. Buku Pegangan Seksi Teknologi Penangkapan dan Kapal Perikanan. Makassar: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan.
- [6] Supriharyono. 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- [7] Undang-undang Nomor Replik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
- [8] Nasional. 2005. Surabaya: Serba Jaya. Yonvitner (Peneliti Pusa Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Insitutut Pertanian Bogor (KSP-IPB); Tim Pokja ICM Desa Kementerian dalam Negeri), Mengelola Desa Pesisir, KOMPAS, 04 November 2014.